



PEMORALITASAN SEBAGAI POLA DASAR PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER PESERTA DIDIK

Oleh :

I Ketut Madja

Dosen Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
madjaketut@gmail.com

Diterima 11 Oktober 2018, direvisi 6 Pebruari 2019, diterbitkan 29 Maret 2019

Abstract

There is a term indicates 'long life education'. It is meant that the human being as a primary creature in this life, and as long as he exists in this world, should motivate themselves to learn and get the science more than before. This term has permanently become a part of various education issues. Science's progress recently trend to influent not even the world education, but the progress of technology also comes with it. The information progress as one of some indicators of science technology progress, is also taking a part in it. The acces that is prepared in various media, /give wide opportunity used in fullfilling the information need. Education and learning are so much important in the human life. Both are intergrated as a perfectly unite, can not be spared one each others. They must be in the form of harmonization. The learning process does not transferisation's problem and concentration of science only, but the education should be regarded as an aspect that is able to support the learning process. The knowledge that is obtained by students, if it is not supported by the educative things, makes either as student or an educated people trend to be immoralize, lack their spiritual, and phisological skill. For the future, the successful of education and learning are surely needed for the wisdom development moralization in constructing the character's student. In Hindu's perspective, it can be analized by value theory.

Key words: Moralizement, Basic system, Wisdom development, Student's caracter Construction

I. PENDAHULUAN

Belakangan ini kehidupan dunia modern berkembang sangat cepat dan mengglobal memengaruhi hampir di segala aspek kehidupan masyarakat. Unsur-unsur budaya global menyertainya, berdampak pada terjadinya ketidakseimbangan hampir di setiap bidang kehidupan, dan kesatuan social pun sepertinya terancam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari kehidupan modern yang mengglobal dewasa ini, tidak mau ketinggalan mewarnai kehidupan. Informasi-informasi yang disuguhkan melalui teknologi informasi sebagai salah satu ciri dari kemajuan teknologi, mudah diakses setiap saat diperlukan. Dunia pendidikan tidak mampu

berkelit dari kondisi ini. Untuk lebih cepat dan efektifnya memperoleh informasi, apalagi yang berkaitan dengan dunia ilmu pengetahuan, pemanfaatan teknologi informasi melalui media yang diinginkan - meskipun bersifat relative - boleh menjadi pilihan pemenuhan kebutuhan informasi, asalkan tetap didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang filteratif. Ketidakmampuan memfilterisasinya akan berdampak dalam kehidupan. Di masyarakat akan ada kecenderungan untuk lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan dunia materi dari pada dunia rohani. Mestinya ia harus seimbang untuk keharmonisan lahir bathin, menghindari arakkisme, konflik inter dan antar masyarakat, sekalipun dalam bentuk



persoalan berskala kecil. Dalam dunia pendidikan yang bergandengan dengan proses pembelajaran apabila tidak tanggap menangkap kencenderungan seperti tersebut di atas, akan berpeluang besar untuk dimanfaatkan oleh siswa sekaligus peserta didik untuk – paling tidak bersikap yang sama, anarkis, seperti misalnya perkelahian, tawuran antara pelajar.

Dalam kontek proses pembelajaran, hendaknya dihindari cara pembelajaran yang berorientasi pada *teacher learning process*. Proses pembelajaran ini mengalir sedemikian rupa disampaikan guru, tanpa memperhatikan kemampuan siswa menangkap, dan memahami materi ajar yang dijelaskan guru. Yang perlu diperhatikan adalah proses pembelajaran yang berpegangan pada *student learning process*, suatu proses pembelajaran yang bersifat tidak statis, tetapi dinamis disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga terkesan kalau proses tersebut bukan sekedar pentransferan pengetahuan semata.

Pendidikan dan pengajaran adalah dua aspek yang saling terkait. Ibarat dua sisi mata uang. Ia terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apabila ada *statement* bahwa dalam proses pembelajaran, yang dipentingkan semata-mata hanya konsentrasi pada transferisasi ilmu pengetahuan kepada siswa. Ini sesungguhnya pernyataan yang keliru, karena kontennya hanya melihat dan bermakna ada interaksi antara guru dan siswa dalam proses tersebut, padahal itu bukan berarti aspek pendidikan harus ditinggalkan begitu saja. Ia berjalan seiring sejalan. Pembelajaran tidak akan berarti apabila tanpa didukung oleh pendidikan. Tidak ketinggalan potensi rohaniah peserta didik, seperti misalnya moral, etika, dan budi pekerti, sangat perlu diperhatikan, meski pada awalnya potensi yang tersebut terakhir ini pada awalnya diasumsikan sebagai ‘faktor pembawaan’ dari sejak lahir, memunculkan potensi rohani yang immoral, misalnya’. Justru hal inilah yang sangat perlu diperhatikan, kemudian digali dan ditumbuhkembangkan, disesuaikan dengan

peradaban dan budaya yang berkembang di masyarakat dan bangsa. Pengetahuan yang diperoleh siswa jika diimbangi dengan hal-hal yang bersifat mendidik, menjadikan siswa sekaligus peserta didik sebagai insan yang bermoral dan berbudi pekerti secara spiritual, dan terampil secara jasmaniah. Potensi-potensi sepiritual dan jasmaniah – meskipun berbeda dimiliki peserta didik – perlu lebih digali, dikembangkan, dan dioptimalkan secara actual sesuai dengan jenjang dan jenis-jenis pendidikan yang diikutinya, peradaban serta budaya yang ada dalam masyarakat, agar ke depan mampu mencerminkan hakikat dan martabat sebagai insan Tuhan, dan terampil secara jasmaniah.

Peranan guru agama sangat strategis dalam kontek proses pembelajaran dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, dan optimalisasi potensi rohaniah peserta didik, pendidikan yang dilandasi dengan ajaran-ajaran agama, yang diberikan guru, menjadi salah satu elemen pendidikan yang sangat urgen, karena peserta didik mampu dibentuk untuk menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, bermoral positif, dan berbudi pekerti yang luhur. Hal ini akan tercermin ketika telah terbentuk penyosialisasi diri peserta didik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Artinya, bahwa secara etika religius, peserta didik dipandang telah mampu mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan yang berlangsung secara informal dalam keluarga, secara formal di sekolah, dan secara non formal di masyarakat. Dalam proses pembelajaran, dan pendidikan, kondisi-kondisi yang dikehendaki seperti tersebut di atas, akan menjadi tantangan bagi guru agama sebagai bagian dari pelaku pemoralitasan yang dipergunakan sebagai pola dasar pengembangan kebijakan dalam pembentukan karakter peserta didik khususnya dilihat dari pespektif agama Hindu. Titik tolak pemikiran itu beroorientasi pada bagaimanakah pola dasar pemoralitasan itu dilakukan, dan mengapakah pemoralitasan itu dilakukan. Orientasi pemikiran seperti ini, hanya merupakan sebagian kecil dari ragam



persoalan yang barangkali diungkap dengan berbagai pertanyaan dari berbagai pihak, khususnya yang bergerak dalam dunia kependidikan.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Pemoralitasan

Istilah ‘pemoralitasan’ terbentuk dari kata dasar ‘moral’. Moral dari kata latin *moralis – mos, moris* (adat istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, kelakuan), (Bagus 2000:672). Ada beberapa pengertian menyangkut tentang moral. Sesuai dengan arti kata moral tersebut di atas, dapat dikatakan ‘moral’ adalah menyangkut cara seseorang bertingkah laku dalam hubungannya dengan orang lain. Tingkah laku perbuatan seseorang yang diperlihatkan dalam keseharian hidupnya sesuai dengan kaidah-kaidah yang bisa diterima oleh lingkungannya setempat. Di dalam ‘moral’ itu sendiri tersirat adanya sesuatu yang salah, benar, baik atau buruknya perilaku seseorang. (Poespoprodjo, 1999:13) mengatakan kalau moral itu sesuatu yang benar-benar ada dan tidak bisa dipungkiri. Adanya keyakinan tentang moral, dan keharusannya itu bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang kadang nampak kurang, dan ada yang kadang-kadang lebih jelas.

Dari kata ‘moral’ berkembang menjadi ‘moralitas’. Santayana yang menyitir Kropotkin (dalam Bagus, 2000:674), antara lain mengatakan bahwa moralitas berkaitan lebih erat dengan adat istiadat atau kebiasaan. ‘Moralitas’ memiliki pengertian yang sama dengan ‘etika’. Ia berasal dari bahasa Latin *mos* (jamaknya *mores*) yang berarti kebiasaan atau adat, suatu pengertian yang sama dengan ‘etika’ dari bahasa Yunani *ethos* yang mempunyai banyak arti seperti watak, perasaan, sikap, perilaku, tatakrama, tatasusila, sopan santun, cara berpikir. Dalam bentuk jamak *ethos* adalah *ta etha* yang berarti adat kebiasaan (Suhardana, 2006:1).

Dari segi kebahasaan, kata ‘Pemoralitasan’ menunjukkan adanya penempatan awalan ‘pe’ dan akhiran ‘an’ pada kata ‘moralitas’, sehingga terbentuk kata ‘pemoralitasan’. Dalam kontek ini dapat dimaknai sebagai

usaha sadar seorang dewasa untuk memoralitaskan sikap laku jasmani dan rohani seseorang atau sekelompok orang dalam lingkungan tertentu sebagai tempat mereka menyosialisasikan diri. Dari proses sampai kepada terbentuknya pemoralitasan, tentu harus ada yang bertanggungjawab. Orang tua sangat berperan penting sebagai titik awal pemoralitasan, dilanjutkan oleh guru di setiap jenjang pendidikan di sekolah sebagai institusi pendidikan formal, dan lembaga pendidikan non formal. Artinya bahwa dalam pemoralitasan tersebut ada pemoral-pemoral sebagai pelaku-pelaku yang bertugas dan wajib memoralitaskan peserta didik sesuai dengan adat kebiasaan, budaya masyarakat suatu bangsa.

2.2 Pola Dasar

Pola, dalam Bahasa Inggris diartikan , *pattern, contoh pattern for sewing* artinya pola baju, *system, model of how something is done*, (M. Echol dan Shadily, 1997:432). Apabila kata ‘pola’ dilihat dari arti ‘*model of how something is done*’, maka dapat diartikan ‘bagaimana sesuatu itu dilakukan’. Ada banyak arti kata ‘dasar’. Hal ini tergantung pada kontek yang dipersoalkan. Dalam kontek dan relevansinya dengan tulisan ini, kata ‘dasar’ akan dikaitkan dengan makna yang terimplisit dalam ungkapan itu. Dalam Kamus Indonesia-Inggris disebutkan kata ‘dasar’ diartikan; 1) *basis*. Contoh ‘saling hormat menghormati adalah dasar persahabatan, mutual respect is the basis of friendship. Itu memang sudah dasarnya ia begitu’, *that is really the way she, he is.* 2) *nature*. Contoh kepandaian dasarnya, artinya *natural aptitude*. 3) *by its nature*, ‘pada dasarnya ia orang yang baik, *by its nature he is a good person, or basically he is good person*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa pola dasar adalah suatu dasar atau landasan yang dipergunakan sebagai pijakan seseorang, atau suatu institusi dalam mengimplementasikan arah atau tujuan yang telah ditentukan. Hal ini perlu dipertegas lagi secara spesifik, agar aspek substantive persoalan yang dideskripsikan tidak keluar dari arah atau tujuan itu sendiri. Terkait



dengan maksud tersebut, makna yang tersirat di dalam arti kata ‘pola dasar’ tersebut di atas lebih menekankan pada norma sikap laku perbuatan seseorang baik eksistensitasnya sebagai individu, atau anggota lingkungan masyarakat sekitar. Dikaitan dengan proses pembelajaran dan pendidikan, di domain inilah kemudian dikenal dengan adanya lembaga pendidikan; 1) informal, berlangsung dalam keluarga sebagai titik awal pendidikan itu berlangsung. Orang tua yang bertaggung jawab mendidik anak dalam penumbuhkembangan potensi-potensi jasmani dan rohaniah anak. Hasil yang diperoleh dari pendidikan ini, tercermin dalam pendidikan formal. 2) Pendidikan formal, terjadi di setiap jenjang pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Sekolah merupakan tempat awal pertama siswa sekaligus sebagai peserta didik menyosialisasikan diri dengan lingkungan formal mereka. Ketika proses sosialisasi itu terjadi, peranan guru dalam kontek pendidikan, sangat diperlukan untuk menggali, dan menumbuhkembangkan potensi jasmani di satu sisi yang mencakup rasa, karsa, cipta, dan keterampilan. Di sisi yang lain, penumbuhkembangan potensi rohaniah pun menjadi bagian dari pendidikan itu. Potensi ini akan bersentuhan dengan pola sikap laku perbuatan. Ia menyangkut norma, moral, etika, dan budi pekerti. Aspek-aspek ini dapat dipandang sebagai dasar penguatan aspek spiritual peserta didik. Hasil yang diperoleh sulit diukur, karena bersifat kualitatif. 3) pendidikan non formal, ini pada umumnya berlangsung di dalam masyarakat. Dua jenis pendidikan yang tersebut sebelumnya akan tercermin di masyarakat sebagai tempat yang cukup kompleks untuk sosialisasikan diri, dan dalam penerapan secara actual hasil pendidikan yang telah diperoleh sebelumnya. Artinya seberapa jauh optimalisasi hasil pendidikan jasmaniah maupun rohaniah yang telah diperoleh peserta didik mampu seutuhnya diperlihatkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat.

2.3 Pengembangan Kebijakan

Kata ‘pengembangan’ apabila ditelusuri berawal dari kata dasar ‘kembang’, artinya

bahwa ada sesuatu yang berkembang atau mengembang, misalnya menyangkut tentang ‘pikiran’ atau ‘pengetahuan’ dikatakan berkembang atau mengembang, Artinya ‘pikiran’ itu sesuai dengan substansinya sudah terbuka, atau pengetahuan seseorang sudah berkembang atau mengembang menjadi sempurna. Kata ‘ber’ dan ‘me’ pada kata ‘berkembang’ dan mengembang’, berfungsi sebagai awalan yang dapat dimaknai sebagai sesuatu yang sedang bergerak ke arah tujuan yang telah ditentukan. Kata ‘kembang’ bisa juga mengalami perubahan makna tergantung pada sufik, infik yang dilekatkan padanya. Kata ‘pengembangan’ dalam kaitan ini diartikan sebagai ‘perbuatan’ mengembangkan tentang sesuatu sesuai konteknya. Apabila kata ‘pengembangan’ itu dikaitkan dengan kata ‘kebijakan’, maka perlu dicermati terlebih dahulu pengertian ‘kebijakan’ tersebut. (Poerwadarminta, 1954:13) melihat kata ‘kebijakan’ itu dari kata dasar ‘bijak’, diartikan; cakap, pandai karena berpengalaman, selalu memakai akal budi. Mendapat awalan ‘ke’ dan akhiran ‘an’, maka kata bijak menjadi ‘kebijakan’, artinya kepandaian, kepemahaman. Beranjak dari pengertian ini, pengembangan kebijakan dimaksudkan adalah kepemahaman, kepandaian, atau kecakapan lembaga kependidikan terhadap pola dasar pengembangan kebijakan pendidikan karakter dalam upaya pemoralitasan sikap laku perbuatan peserta didik.

2.4 Pembentukan Karakter Peserta Didik

Pembentukan diartikan sebagai ‘cara’, ‘perbuatan’ dsb membentuk sesuatu, misalnya ‘pembentukan cabinet’, ‘pembentukan kata-kata baru’, ‘pembentukan undang-undang’. Mencermati contoh yang digunakan dalam kata ‘pembentukan’ menunjukkan bagaimana cara atau perbuatan itu dilakukan membentuk sesuatu (kata-kata baru, undang-undang, cabinet) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Poerwadarmita, 1954:93).

Ada beberapa pengertian tentang karakter. Muhammad Yauni, (2014:7)



mendefinisikan karakter adalah moralitas, kebenaran, kebaikan, kekuatan, dan sikap seseorang yang ditujukan kepada orang lain melalui tindakan. Oleh [Bagus, 2000: 392] antara lain diartikan sebagai nama dari jumlah seluruh ciri pribadi yang meliputi seperti perilaku, kebiasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kemampuan, kecenderungan, potensi, nilai-nilai dan pola-pemikiran.

Pusat Pendidikan Bahasa seperti dikutip Zubaedi (dalam Juliadi, 2015:17) mendefinisikan karakter adalah bawaan, hati, jiwa, keperibadian, budi pekerti. Perilaku pesonalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Senada dengan ini karakter adalah kepribadian, perbuatan, sifat, tabiat, dan watak. Yang difokuskan dalam pendidikan karakter adalah pengaplikasian tindakan karena itu, seseorang yang berpikiran tidak jujur, kejam, atau rakus, diartikan seseorang yang mempunyai karakter jelek, berbeda dengan seseorang yang berbat jujur, suka menolong, itu bisa disebut seseorang yang mempunyai karakter baik. Dapat dikatakan bahwa karakter adalah sifat, atau watak yang dapat diekspresikan seseorang lewat pola pikiran yang potensial berlandaskan pada kejuran sikap dan perilaku sesuai dengan norma. Dalam norma ada sesuatu yang telah diatur, dan distandarisasi menurut ukuran yang telah ditentukan, sehingga ia berlaku dalam masyarakat.

Di dalam keluarga, norma yang pada umumnya bersentuhan dengan nilai-nilai kehidupan, bisa diteladankan orang tua pada anak, di sekolah oleh guru terhadap peserta didik. Peserta didik adalah siswa itu sendiri, memiliki beberapa diferensiasi misalnya dalam hal antara lain; potensi dasar kognitif, afektif, dan piskomotorik, perioderisasi perkembangan dan pertumbuhan meski dalam pola yang relatif sama, kebutuhan yang harus dipenuhi baik jasmani maupun rohani, adaptasibilitas di dalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang unik. Adanya perbedaan-perbedaan seperti ini, diperlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok, serta mengarapakan perlakuan

yang manusiawi dari orang dewasa atau gurunya. Di sekolah adalah awal mula mereka menyosialisasikan diri, berbekal pada norma yang ditantanamkan orang tua mereka. Di sekolah diperlukan reorganisasi dan revitalisasi terhadap norma-norma peserta didik, dengan cara menggali segala potensi jasmani dan rohani peserta didik, dan memadukannya dengan norma-norma yang universal. Dua ranah pendidikan yang diperoleh (anak dan siswa) akan kelihatan hasilnya secara optimal ketika mereka sudah terlibat dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat.

2.5 Landasan Pemoralitasan

Apabila pemoralitasan dipandang penting dipergunakan sebagai pola dasar terhadap pengembangan kebijakan pendidikan karakter di lembaga kependidikan, maka diperlukan suatu gagasan kebersamaan pola dan kerangka berpikir yang teratur, dan bersistem, sehingga hasil yang ingin dicapai bisa diterima secara logis. Berpikir sintesis, sebagai bagian dari lima cara berpikir yang harus dimiliki seseorang dalam menghadapi berbagai persoalan, menurut Howard Gardner (dalam Yaumi, 2014:20). Adalah mengambil dan menerima informasi dari berbagai sumber, memahami dan mengevaluasi informasi tersebut secara objektif, serta menempatkan bersama dalam suatu jalur atau kerangka berpikir yang memungkinkan dapat dipahami oleh siapa saja yang membutuhkannya. Untuk menghadapi persoalan itu, ada beberapa faktor yang mesti dikedepankan untuk dapat dipakai sebagai landasannya, seperti misalnya landasan psikologis, landasan etika humanis, dan landasan agama. Artinya landasan-landasan ini mengedepankan aspek etikanya ketika sesuatu hal dilakukan. Ketiga faktor ini harus juga secara kontekstual diselaraskan dengan pendidikan karakter itu sendiri.

2.5.1 Landasan Psikologi Faktor Pendukung Pola Dasar Pemoralitasan

Sebagai pola dasar, pemoralitasan terhadap pengembangan kebijakan pendidikan karakter harus didasarkan pada faktor psikologis pengembang kebijakan, dan



pendidikan karakter. Pengembang kebijakan ialah mereka yang memiliki otorita yang inovatif untuk mengagas, membuat, dan mengembangkan kebijakan-kebijakan yang memungkinkan pola dasar pemoralitasan, dan pendidikan karakter menjadi bertumbuhkembang dalam institusi kependidikan, tidak saja berputat pada tanggungjawab moral, tetapi harus memperlihatkan hasil kerja yang baik, hasil kerja yang berkualitas, kerja yang terampil sesuai dengan profesi, kerja dengan penuh tanggung jawab, dan menikmati dengan baik pekerjaan itu, meskipun dinamika pendidikan sedang dalam kondisi yang sulit. Pemikiran yang sama secara etis sangat relevan juga diterapkan dalam pendidikan karakter. Kondisi-kondisi yang terkait dengan aspek psikologis negative hendaknya tidak dicurahkan dalam pola dasar pemoralitasan, dan pendidikan karakter.

2.5.2 Landasan Etika Humanis Fakor Pendukung Pola Dasar Pemoralitasan

Sebelum landasan etika humanis bisa dipakai sebagai pendukung pola dasar pemoralitasan pengembangan kebijakan pendidikan karakter, maka perenungan kita dalam kontek ini diarahkan pada rumusan Aristoteles dalam karyanya berjudul *Ethics*. Aristoteles seperti yang disitir Poespoprodjo, (1999:34) (dalam Madja 2015:71) mengatakan bahwa manusia dalam semua perbuatannya senantiasa mengejar sesuatu yang baik. Oleh karen itu ia merumuskan definisi baik sebagai sesuatu yang menjadi arah semua hal, sesuatu yang dikehendaki dan sebagai sesuatu yang dituju. Sedangkan untuk definisi ‘tujuan, ia mengatakan sebagai suatu hal yang untuknya dikerjakan. Dikatakan setiap tujuan adalah suatu yang baik, dan setiap yang baik adalah suatu tujuan. Suatu tujuan tidak akan pernah dicari, manakala bukan merupakan suatu yang baik bagi si pencari, dan hal baik yang dicari adalah tujuan yang dicapai. Sebelum berbuat sesuatu yang berpotensialitas untuk berbuat atau tidak berbuat, manusia ada dalam kondisi tidak berkepastian, yakni antara berbuat dan tidak berbuat. Tidak akan pernah ada perbuatan

manakala ketidakpastian tidak disingkirkan oleh sesuatu yang menggerakan hal yang ada untuk berbuat. Misalnya dipakai contoh kondisi ketidakpastian untuk tidak berbuat ini dialami oleh Dewi Uma, istri Bhatara Siwa yang dikisahkan dalam gaguritan Sudamala.

Bagian inti ceritera gaguritan dimaksud, yakni pelukisan sikap dan tindakan Dewi Uma, sosok wanita dan sekaligus sebagai istri tercinta Bhatara Siwa, ketika ia berhasil memperoleh air susu lembu putih di *marcapada*, sebagai obat Bhatara Siwa, yang – tidak diketahui oleh Dewi Uma – berpura-pura sakit di sorga *loka*. Hal ini dilakukan atas dasar cinta kasih, kesetiaan dan rasa kemanusiaannya kepada suami. Dilihat dari kesetiaannya tentu memiliki tujuan yang baik, yakni demi kesembuhan Bhatara Siwa (sang suami). Mengacu pada rumusan etika tersebut di atas, menunjukkan ‘tujuan yang baik’ yang dilakukan, dicari, dituju, dan menjadi arah perjalannya ke dunia adalah untuk sebuah tujuan, yang untuknya suatu pencarian air susu lembu putih dikerjakan, meski pada awalnya dipandang sulit untuk memperolehnya.

Fokus pada perhatian konsep ‘baik’ sepanjang diterapkan dalam arti moral, paling tidak memunculkan pertanyaan ‘apakah semua perbuatan manusia mengarah pada suatu tujuan dan sesuatu yang baik’ Dari perspektif etika humanistik, apa yang dilakukan Dewi Uma bisa dipandang sebagai sesuatu ‘yang baik’, karena ada rasa kemanusiaan yang dimilikinya untuk berlaksana. Etika humanistik kerap memandang ‘yang baik’ terbatas pada garis perbuatan manusia, dan bahkan sering menemukan bahwa garis tersebut tidak mudah dilihat. Etika humanistik memandang tidak semua hal ‘baik’ untuk setiap hal. Oleh karena itu manusia harus bertanggung jawab untuk menentukan hal-hal yang ‘baik’ baginya. Dalam segala hal, tentu ada hal-hal baik yang tidak tentu merupakan hal yang etis atau moral yang baik. Kondisi inilah yang dialami Dewi Uma untuk keras bertekad memperoleh air susu lembu putih, meskipun ketidakpastian



berbuat atau tidak berbuat bergelayut di benaknya.

Para filosof kerap kali mengaitkan pandangan filosofisnya dengan dunia etika. Seperti misalnya filsuf Jerman Immanuel Kant. Ultilitarianisme, demikian istilah yang dilekatkan pada pandangan filosofisnya ketika bersentuhan dengan aspek moral dan etika. Karenanya muncul kemudian paham Ultilitarianisme. Aliran ini menekankan pada prinsip kebermanfaatan, suatu prinsip yang fundamental dalam mengukur sebuah tindakan. Apa yang telah dilakukan seseorang bisa dikatakan bermoral apabila membuat hasil yang benar atau sesuai dengan yang diinginkan. Dimaksudkan bahwa atas manfaatlah yang dipakai sebagai indicator utama terhadap berguna atau tidak bermanfaatnya hasil dari suatu tindakan bagi pihak-pihak lain. Secara teoretis Ultilitarianisme focus pada akibat atau kosekuensi dari suatu tindakan. Senada dengan ini, filsuf Inggris, John Stuart Mill mengatakan sebuah tindakan adalah benar jika tindakan itu membuat hasil yang baik atau diinginkan (Putra, 2014:xiii) Artinya bahwa hasil yang benar adalah hasil yang merujuk pada kebaikan, yang tergantung dari jumlah kesenangan yang dihasilkan untuk sebanyak-banyaknya orang. Kebergunaan dan kemanfaatan dipandang sebagai cara untuk mempromosikan kebahagiaan umum, dan mencegah penderitaan.

2.5.3 Ladasan Etika Deontologis Faktor Pendukung Pola Dasar Pemoralitasan

Seseorang yang menyadari dirinya sebagai manusia, kadang bertanya tentang tindakan, kewajiban atau tugas yang akan dilakukan. Paling tidak seperti rumusan pertanyaan yang dikemukakan oleh (Putra, 2014:xii) ‘misalnya ‘mengapa saya melakukan sesuatu (tanda Tanya). Sungguh bahwa pertanyaan ini terkait dengan aspek etika, dengan demikian jawabannya pun harus jangan sampai lepas dari dunia etika. Etika yang dimaksud dalam hal ini yakni etika teleologis atau konsekuensialis, dan etika deontologis non konsekuensialis. Dikatakan etika teologis karena ‘saya melakukan

tindakan itu’ ada sesuatu yang saya inginkan (misalnya agar saya terkenal, dihormati, dan dikagumi orang lain). Dikatakan etika deontologis non konsekuensialis karena tindakan yang saya lakukan itu semata-mata atas dasar kewajiban, tidak menginginkan apapun selain menyelesaikan tugas kewajiban itu. Dilihat dari aspek moral, etika deontologis non konsekuensialis inilah yang kemudian dijadikan rumusan tentang tindakan moral yang dilakukan. Dikatakan secara umum, tindakan moral yang dilakukan, adalah demi prinsip yang dijadikan teladan. Nilai moral suatu tindakan tidak tergantung pada tujuan, tetapi sebaliknya pada satu prinsip di atas mana tindakan itu didasarkan pada satu - Immanuel Kant menyebut ‘prinsip praktis tanpa syarat’, atau Imperatif Katagori (IK), formulasi antara lain bertindaklah dengan cara demikian sehingga dalil [maxim] dari tindakan itu dapat menjadi hukum universal, kalau tidak bisa diuniversalkan tidak dapat menjadi kewajiban (Putra, 2014:xii-xiii)

Merujuk pada tindakan moral yang dilakukan atas dasar ‘prinsip praktis tanpa syarat’ yang dikemukakan dalam etika deontologi non konsekuensialis, menunjukkan adanya etika yang berkaitan dengan tugas (*duty*), atau kewajiban, maka dikenal dengan istilah deontologi, dari kata Yunani *deon* (keharusan, kewajiban). Secara arfiah istilah ini semacam ‘teori tentang kewajiban’ (Bagus, 200:157), diperkenalkan oleh Bentham. Menurutnya deontologi adalah suatu cabang etika, ilmu yang bergumul dengan kewajiban, tuntunan dan perintah moral, dan gagasan tentang kewajiban pada umumnya sebagai keharusan social yang khusus bagi etika (Bagus, 2000:158). Kaum deontologi berpandangan bahwa yang menjadi titik sentral dalam setiap melaksanakan tugas adalah norma. Suatu tindakan dapat menghasilkan sesuatu yang benar secara moral, jika tindakan tersebut sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku (Yaumi, 201:33). Menurut Immanuel Kant (1724-1804) seseorang seharusnya memiliki norma moral dalam dirinya, motivasi untuk melaksanakan tugas dan



tanggung jawab dengan cara menghormati keabsahan aturan hukum dan norma yang berlaku, dan harus mematuhi sepenuh hati, harus pula mampu menjelaskan dengan pikiran yang jernih tentang tugas yang diembannya telah dilakukan dengan benar secara moral. Rumusan yang dikembangkan Immanuel Kant ini dikenal secara luas dengan istilah etika tugas (*duty ethics*), dikenal juga dengan teori Kantian, alirannya disebut Kantianisme. Jika dilihat dari pola dasar dipakai sebagai pemerlalitasan pengembangan kebijakan pedidikan karakter peserta didik khususnya, maka etika deonologis non konsekuensialis memberikan ruang yang cukup optimal untuk dipakai faktor pendukung pemoralitasan tersebut, karena dari perspektif institusional kependidikan, dipandang efektif untuk dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam membangun kesadaran untuk menghormati dan menaati aturan yang berlaku demi keharmonisan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.5.4 Landasan Etika Agama Hindu Faktor Pola Dasar Pemoralitasan

Ada banyak definisi mengenai agama dijumpai. Hal ini sangat bergantung kepada perspektif masing-masing dalam mendefinisikan agama itu sendiri, karena esensi agama adalah keyakinan yang dilandasi oleh kepercayaan. Kepada siapa keyakinan dan kepercayaan itu ditujukan, adalah masalah yang dipertanyakan manusia. Oleh karena itu agama berkaitan dengan; 1) masalah hubungan manusia dan dunianya dengan Tuhan. Pemikiran ini mengindikasikan adanya sifat ‘terikat kepada’. Dimaksudkan terikat kepada asal usul pertama dan terakhir. Oleh karena itu yang dipandang sebagai yang pertama dan terakhir mendapat tempat yang khusus dan isimewa. 2) Ada objek yang diperhatikan, dan objek itu hendaknya diberikan keistimewaan dan kekhususan dalam pola pemikiran dan perbuatan menyembah dengan sikap *bhakti* dan mempersesembahkan dalam bentuk ritual, segala sesuatu yang berharga milik penyembah sebagai tanda lahiriah dan wujud

penyerahan diri. 3) Perhatian ini kemudian menyadarkan manusia memiliki hubungan yang istimewa dan khusus dengan objek tersebut, yang tiada lain dalam agama Hindu disebut Ida Sanghyang Widhi Wasa, tiada lain adalah Tuhan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa agama adalah kepercayaan terhadap adanya Tuhan, serta segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan itu. Artinya sembahyang, berdoa, melakukan ritual, dan kebijakan kepada sesama adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan agama. Agama mengajarkan tentang mora, nilai etika, pentingnya melakukan perbuatan baik, berbagai ajaran spiritual, tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jelek (Yaumi, 2014:35).

Pendidikan secara sederhana dan umum, menurut (Anwar, 2015:19) adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Tim Dosen IKIP Malang (dalam Anwar, 2015:23) dalam bahasan mereka antara lain menyimpulkan pengertian pendidikan adalah aktivitas dan usaha manusia untuk meningkatkan kepribadiannya dengan jalan membina segala potensi pribadinya yaitu rohani (pikir, karsa, rasa, cipta, dan budi nurani).

Ajaran agama bertitik tolak dari adanya keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Kuasa, yang kuasa atas segala yang ada, memiliki dasar keimanan sendiri-sendiri, cara memujanya Tuhannya, menghormati orang-orang suci yang mulamula menyampaikan ajaran agama kepada pemeluknya. Agama Hindu mengajarkan umatnya ajaran yang universal, agama yang memberikan kebebasan untuk mengalami rasa agamanya. Oleh karena itu agama Hindu ‘*experienced religion*’ agama yang dirasakan oleh seluruh pemeluknya, agama yang mengajarkan bukan agama untuk satu golongan, suku, tapi untuk siapa saja yang bersedia mengamalkan ajarannya, ajaran yang senantiasa segar sepanjang zaman, mengajaran kebenaran, karena kebenaran itu



sendiri tidak pernah lapuk dimakan usia meskipun pemeluknya bisa menjadi tua, kemudian mati, namun yang muda akan mengantikannya sebagai tenaga baru untuk tumbuh dan berkembang dengan tenaga dan nafas segar mengikuti beredarnya zaman.

Etika atau moralitas dalam agama Hindu dinamakan ‘susila’. Kata ‘susila’ berasal dari dua suku kata yakni ‘su’ dan ‘sila’. ‘Su’ artinya baik, dan ‘sila’ berarti kebiasaan atau tingkah laku perbuatan manusia. Karenanya dalam agama Hindu, etika dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tata nilai, tentang baik dan buruknya suatu perbuatan yang harus dikerjakan atau dihindari, sehingga tercipta hubungan yang baik diantara sesama (Suhardana, 2006:19). Etika itu sendiri adalah tata laku atau perbuatan yang baik, dan biasanya disebut ‘sila’. Ilmunya dinamakan ilmu tentang ‘sila’ atau ‘tata susila’. Salah satu aspek dalam ilmu etika adalah membahas aspek moral dan arti dari apa yang dikatakan baik dan tidak baik. Ajaran-ajaran etika agama Hindu sesungguhnya telah termuat dalam kitab suci Veda, dan kitab-kitab susastra Hindu lainnya, bisa dipergunakan sebagai pendukung pola dasar pemoralitasan dimaksud di atas. Hanya beberapa saja yang dirujuk seperti beeikut ini. Etika tentang kebenaran dan kejujuran (*satyam*) yang menuntun manusia dapat dilihat seperti disebut dalam kitab *Yajurveda* I.5 sebagai berikut.

*Agne vratapate vratham criśyāmi
Tacchakeyām tanmeradhyatām
Idam aham anytāt satyam upaini*

Artinya

Kami akan menjalankan janji kebenaran
Semoga kami berhasil melaksanakannya
Akan kami laksanakan dengan teguh tanpa
dusta

Pernyataan yang menuntun untuk tidak menyakiti (*ahimsa*) sesama antara lain termuat dalam *Rgveda* I.114.7, dinyatakan sebagai berikut; ‘ma na uksantam uta māna uksatam’. ‘ma no vadhih pitaram’, ‘mota

mataram’. Artinya janganlah menyakiti orang tua dan orang muda, jangan menyakiti orang-orang muda dan orang-orang tua. Hal-hal yang terkait dengan etos kerja dinyatakan dalam *Rgveda* XX.18.3; *iccanti devah sunvantam, na svapnaya sprhayanti, yanti pramadam atandrah*. Artinya para dewa menyukai pekerja keras, para tidak suka dengan pemalas, orang yang selalu waspada akan mencapai kebahagiaan yang agung.

Dalam kitab *Sarasamuçcaya cloka/padarta* 9 digambarkan tentang ‘panumadian saha tatujon hidup’, berbunyi sebagai berikut.

*Mānusah sarva bhutūṣu vrttate vai
çubhāçubhe samaviṣṭan
çubhasvevāvakārayet*

*Ri sakwening sarwa bhuta, iking janma
wwang juga wenang gumawayaken ikang
çubhaçubhakarma, kuneng panetasakena
ring çubhakarma juga ikang açubhakarma,
phalaning dadi wwang.*

Tēgēs

*Mungguwing sakatah ipun isarwa tumuwuh,
imānusa kewantēn mrēsidayang
mangaryanin punika karma sane bēcik sane
kawon, samalih dados anggen ngaruwatang
punika karmane kawon kakarmane bēcik
wiyakti, pikolihe dados manusa (pikolih sang
dados manusa) (Menaka,;17)*

Jika dimaknai isi *sloka* tersebut di atas menyiratkan bahwa hanya manusia saja yang bisa berbuat salah atau benar, bisa mengubah yang salah menjadi benar atau sebaliknya. Makhluk lain seperti itik misalnya hanya pintar berenang bukan karena ia belajar untuk itu, tetapi karena yoninya seperti itu. Oleh karena itu bermoral atau tidaknya perbuatan manusia tercermin pada etika dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam *Manawa Dharmacastastra*, *Atha Dwadaco’dhayayah* (buku ke duabelas) sloka 3 disebutkan sebagai berikut.

*Çubhāçuba phalam karma
manowāgdeha sambhawam*



karmajā gatayo nrnam utama dhyamāh (*Pudja dan Sudharta*, 199:3).

Karma yang lahir dari pikiran, perkataan, dan badan menimbulkan akibat baik atau buruk dengan *karma* telah menyebabkan timbulnya bermacam-macam keadaan pada diri manusia baik bagi yang tertinggi, yang menengah maupun bagi yang terendah.

Dalam buku keempat (*Atha Caturtho'dhyayah*) *Sloka 145 Manawa Dharmācāstra* disebutkan

Manggalācārā yuktah syāt prayatātmā Japeccajuhuyācacaiwa nityamagnimatandritah (*Pudja dan Sudharta*, 199:250).

Hendaknya dengan seksama mengikuti adat kebiasaan yang terpuji, dan peraturan-peraturan tentang perbuatan baik, kendalikan semua *pancaindria*, ucapan doa, dan haturkan persembahan kepada Tuhan tiap hari

Terkait dengan *karma* atau perbuatan baik, disebutkan dalam *Slokantara sloka 5* sebagai berikut.

Trmakucanuditam kancanaih kim mrganam Phalatarumuditam ratbir wanaranam Asuradhimiditanam gandhibhih sukaranam Na ca bhawati naranam tu pryam tad wicesam (*Oka*, 1993:14).

Seekor rusa atau kijang bahagia karena diberi makan rumput, bukan emas.

Kera bahagia karena diberikan buah-buahan sebagai makanannya, bukan mutiara.

Babi senang diberikan makanan yang sudah busuk, bau bunga harum tidak berarti apa-apa Bagi manusia berbuat baiklah (*dharma*) yang paling utama.

III. KESIMPULAN

1. Sebagai pola dasar pemoralitasan pengembangan kebijakan pendidikan karakter peserta didik, tindakan moral yang dilakukan misalnya oleh; guru, lembaga kepedidikan formal maupun non formal, hendaknya berorientasi pada sebuah prinsip yang

dijadikan teladan, tidak semata-mata berorientasi pada keinginan misalnya; menjadi orang terhormat, memperoleh kedudukan, dan lain sebagainya. Artinya bahwa nilai moral suatu tindakan tidak tergantung pada tujuan, tetapi sebaliknya pada prinsip di atas mana tindakan moral itu didasarkan, inilah satu prinsip dari kewajiban harus sah tanpa syarat, oleh Immanuel Kant disebut ‘Imperatif Katagoris’

2. Pola dasar yang dapat dipakai dalam pengembangan kebijakan pendidikan karakter peserta didik dalam agama Hindu dapat dilihat dalam kitab suci Weda dan susastra-susastra Hindu, serta relevan untuk diimplementasikan dalam pengembangan dimaksud dalam dunia pendidikan dan proses belajar mengajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Muhammad. 2015. *Filsafat Pendidikan*. Rawamangu-Jakarta ; Prenadamedia.
- Bagus, Loren. 2000. *Kamus Filsafat*. Jakarta ; PT Gramedia Pustaka Utama.
- Juliadi, Ngakan Putu. 2015. *Pendidikan Karakter Miwah Sosiologi Sastra Satua Galuh Payuk*. Skripsi. Tidak diterbitkan. Fakultas Dharma Acarya Institut Hindu Dharma Denpasar.
- Madja, I Ketut. 2015. *Nilai-nilai Etis dalam Gaguritan Sudamala*. Guna Widya. Vol.2. No 1. Jurnal Pendidikan Agama Hindu.
- Menaka, I Made. *Sarasamuçcaya*. Singaraja. Indra Jaya.
- Echol, John M. dan Hasan Shadily. 1992. *Kamus Inggris – Indonesia*. Jakarta ; PT Gramedia.
- Oka, I Gusti Agung 1993. *Slokantara*. Jakarta ; Hanuman Cakti.